

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DANA AMANAH PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (DAPM) MANDIRI PERDESAAN
(Studi di Desa Mayanggeneng Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)**

Musta'ana

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Bojonegoro
Jl. Lettu Suyitno No 2 Bojonegoro
Email : anarochim@gmail.com

Abstract

The Community Empowerment Trust Fund (DAPM) is one of the community empowerment programs that supports DAPM Mandiri whose work areas and target areas are rural communities. This study aims to evaluate the implementation of DAPM using a qualitative approach. The results of the study show that 1) The implementation of the Mandiri Rural DAPM Program in Mayanggeneng Village, Kalitidu Subdistrict, Bojonegoro Regency includes preparation, implementation and control activities. 2) In the implementation of the be autonomous Rural DAPM program in the Village of Mayanggeneng, Kalitidu Sub-district has involved Poor Households (RTM) in the deployment of workers. 3) The procedure for implementing the Rural be autonomous DAPM starts from socialization at the Sub-district level then socialization at the village level. After the socialization was carried out the implementation of the Rural be autonomous DAPM activities which included the selection and formation of a management team until the control could be carried out properly. 4) The village community has not yet been able to carry out any activities through village meetings, making them reluctant to attend the deliberations.

Keywords: Evaluation, Community Empowerment Trust Fund

Abstrak

Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) adalah merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang mendukung DAPM Mandiri yang wilayah kerja dan target sasaran masyarakat perdesaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan DAPM dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan Program DAPM Mandiri Perdesaan di Desa Mayanggeneng Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pengendalian. 2) Dalam pelaksanaan program DAPM Mandiri Perdesaan di Desa Mayanggeneng Kecamatan Kalitidu telah melibatkan Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam pengerahan tenaga kerja. 3) Prosedur pelaksanaan DAPM Mandiri Perdesaan dimulai dari sosialisasi pada tingkat Kecamatan kemudian sosialisasi pada tingkat desa. Setelah sosialisasi dilaksanakan pelaksanaan kegiatan DAPM Mandiri Perdesaan yang meliputi pemilihan dan pembentukan tim pengelola sampai dengan pengendalian dapat terlaksana dengan baik. 4) Belum terbiasanya masyarakat desa untuk melakukan setiap kegiatan melalui musyawarah desa menjadikan mereka enggan untuk menghadiri kegiatan musyawarah.

Kata Kunci : Evaluasi, Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat

PENDAHULUAN

Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Mandiri Perdesaan merupakan salah satu program dengan prinsip pembangunan partisipatif yang bertujuan meringankan kemiskinan. Salah satu program penanggulangan kemiskinan adalah Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Mandiri. Penanggulangan kemiskinan dengan menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan, maka pada Tahun 2001 diganti dengan nama Program Pengembangan Kecamatan (PPK), kemudian tahun 2006 diganti dengan nama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan atau yang lebih dikenal dengan PNPM Mandiri Perdesaan yang diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tanggal 22 Desember 2016 dilaksanakan Musyawarah Antar Desa (MAD) khusus perubahan kelembagaan dari PNPM menjadi DAPM. Dan terbitlah Akta Notaris No : AHU-0001580.AH.01.07.Tahun 2017. Dengan nama Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Mandiri Sejahtera Kalitidu.

Melalui DAPM Mandiri ada upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui

proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam DAPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat didorong untuk terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, maka pembangunan dilaksanakan pada berbagai sektor masyarakat. Salah satu sektor yang perlu dibenahi adalah sektor ekonomi. Pembangunan nasional dapat diwujudkan dengan upaya penanggulangan kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan cara meresmikan program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Mandiri. Program tersebut telah meresmikan sejak tahun 2001 sampai sekarang ini sesuai dengan landasan hukum Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Program tersebut diupayakan sebagai penyedia lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil dalam menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Badan Pengurus Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (BPP-DAPM) Desa Mayanggeneng Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur merupakan sebuah lembaga yang bertugas untuk mengelola aset berupa

dana bergulir di masyarakat sebagai warisan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Dana ini dikelola dibawah kerangka kebijakan PNPM Mandiri yang mengedepankan aspek partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Nama DAPM digunakan sebagai pengganti kegiatan dana bergulir di masyarakat yang biasanya disebut dengan dana simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) dan dana untuk kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Hal ini bertujuan untuk mempertegas bahwa dana bergulir tersebut adalah milik masyarakat. Namun demikian pemerintah dalam hal ini memiliki kewajiban untuk membina agar dana yang didedikasikan bagi warga masyarakat miskin tersebut dapat tersalurkan secara tepat dan tidak menghilangkan fungsi sosial dan penerapannya.

Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Mandiri Perdesaan di Desa Mayanggeneng mempunyai dua program yaitu program simpan pinjam dan program fisik. Dalam program simpan pinjam masih ada masalah penunggakan pembayaran setiap kelompok, program fisik kendalanya yaitu kendala lingkungan dan fasilitas kurang. Masih ada masyarakat miskin yang belum dibantu oleh Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Mandiri, ekonomi miskin masih rendah dan harus dipertimbangkan serta bantuan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hal ini di latarbelakangi bahwa masih terdapat kesenjangan antara pencapaian dan sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, yaitu angka kemiskinan dan pengangguran yang masih cukup besar.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Desa Mayanggeneng Kecamatan

Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Fokus penelitian ini ialah 1) persiapan kegiatan, 2) pelaksanaan kegiatan, 3) evaluasi program DAPM Mandiri.

Pengambilan informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling and random sampling*, dalam proses penelitian terinventarisir sumber data primer sebanyak 43 informan.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Dalam menganalisa menggunakan teknik analisis data interaktif *Model miles and Huberman*, yang mengemukakan bahwa “aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahap Persiapan Kegiatan

Pelaksanaan program DAPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Bojonegoro tahun 2017 diawali dengan kegiatan sosialisasi program DAPM Mandiri Perdesaan di tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh BPMD Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 5 Januari 2017 di ruang Setda yang dihadiri oleh Tim Koordinasi DAPM Kabupaten Bojonegoro, Camat, dan satuan kerja lain se-Kabupaten Bojonegoro.

Sosialisasi program DAPM Mandiri Perdesaan tahun 2017 di Desa Mayanggeneng dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2017 di Balaidesa Mayanggeneng Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

Untuk selanjutnya peserta sosialisasi tersebut akan melakukan kegiatan sosialisasi DAPM Mandiri Perdesaan di tingkat desa masing-masing desa sesuai jadwal yang ditentukan. Pada tingkat desa semua kegiatan tahapan

pelaksanaan DAPM Mandiri dilaksanakan melalui musyawarah Desa.

Setelah kegiatan sosialisasi kegiatan selanjutnya ialah penggalian gagasan yang dilaksanakan mulai tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017. Penggalian gagasan dilaksanakan oleh 6 RT Desa Mayanggeneng yang dihadiri oleh 50 peserta yang terdiri dari 10 peserta laki-laki, 20 peserta perempuan dan 20 peserta dari RTM. Pada saat kegiatan penggalian gagasan disepakati, tahap selanjutnya adalah penulisan usulan sebagai berikut administratif yang harus dilaksanakan oleh pelaku DAPM di tingkat desa. Dari hasil pengamatan penulis sebagian masyarakat pelaku DAPM Mandiri Perdesaan merasa kurang mampu dalam pengerjaan penulisan usulan pelaksanaan kegiatan DAPM Mandiri Perdesaan, terutama dalam penghitungan teknis. Dari 43 responden, 39 responden menyatakan kesulitan dalam penyusunan usulan kegiatan.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan DAPM Mandiri dilakukan oleh masyarakat secara swakelola berdasarkan prinsip otonomi dan difasilitasi oleh perangkat pemerintahan yang dibantu oleh fasilitator atau konsultan. Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah proses perencanaan selesai dan telah ada keputusan tentang pengalokasian dana kegiatan. 1) Pemilihan dan penetapan tim pengelola kegiatan, Personil tim pengelola kegiatan yang dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat, bertanggung jawab dalam realisasi fisik, keuangan, serta administrasi kegiatan/pekerjaan yang dilakukan sesuai rencana.

Pemilihan dan penetapan Tim Pengelola Kegiatan di tingkat desa

ditetapkan berdasarkan Musyawarah Desa (MD) yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Kepala Desa. Dalam pemilihan Tim Pengelola Kegiatan ternyata sebagian desa mengalami permasalahan yang hampir sama yaitu Sumber Daya Manusia (SDM). 2) Pencairan atau pengajuan dana, sesuai dengan tahapan kegiatan DAPM Mandiri Perdesaan setelah proses persiapan dan pembentukan Tim Pengelola Kegiatan selanjutnya sesuai dengan jenis kegiatan yang diusulkan yang telah mendapatkan verifikasi dari tim monitoring Kecamatan dan dinyatakan layak, tim pengelola akan mengajukan pencairan atau pengajuan dana DAPM ke UPK Kecamatan Kalitidu.

Proses pencairan dana berdasarkan dana DAPM usulan dari Tim Pengelola tingkat desa selanjutnya di adakan penelitian kelengkapan berkasnya, untuk selanjutnya UPK akan mencairkan dana dalam 3 (tiga) termin, kesatu sebesar 50%, kedua 30% dan terakhir sebesar 20% dari keseluruhan anggaran yang diusulkan. 3)Pengendalian,

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan pemantauan, pengawasan, dan tindak lanjut yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan yang direncanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan program. Pemantauan dan pengawasan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul. Sedangkan tindak lanjut merupakan kegiatan atau langkah-langkah operasional, yang perlu ditempuh berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan, seperti antara lain

koreksi atas penyimpangan kegiatan, akselerasi atas keterlambatan, klarifikasi atas ketidakjelasan dan sebagainya, untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan kegiatan.

3. Evaluasi Program DAPM Mandiri

Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Ada beberapa pengertian tentang program sendiri. Dalam kamus (a) program adalah rencana, (b) program adalah kegiatan yang dilakukan dengan seksama. Melakukan evaluasi program adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan.

Berdasarkan data penelitian bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program DAPM Mandiri Perdesaan Desa Mayanggeneng Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro terlaksana dengan baik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data penelitian bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Mandiri Perdesaan di Desa Mayanggeneng Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program DAPM Mandiri Perdesaan di Desa Mayanggeneng Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pengendalian.
2. Dalam pelaksanaan program DAPM Mandiri Perdesaan di Desa Mayanggeneng Kecamatan Kalitidu telah melibatkan Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam pengerahan tenaga kerja.

3. Prosedur pelaksanaan DAPM Mandiri Perdesaan dimulai dari sosialisasi pada tingkat Kecamatan kemudian sosialisasi pada tingkat desa. Setelah sosialisasi dilaksanakan pelaksanaan kegiatan DAPM Mandiri Perdesaan yang meliputi pemilihan dan pembentukan tim pengelola sampai dengan pengendalian dapat terlaksana dengan baik.
4. Belum terbiasanya masyarakat desa untuk melakukan setiap kegiatan melalui musyawarah desa menjadikan mereka enggan untuk menghadiri kegiatan musyawarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ala, Andro Bayo, Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan, Yogyakarta, Liberty, 1996.
- Arief, Saeful, Menolak Pembangunanisme, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000.
- Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo, Yogyakarta, 2005.
- Islamy Irfan, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta : 2004.
- Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 1983.
- Lexy J. Moleong, Definisi Masalah, Jakarta, 2002.
- Saifuddin Aswar, Masalah Penelitian, Erlangga, Jakarta, 2001.
- Salim, Emil, Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan, Jakarta, Inti Idayu Press, 1984.
- Sumardjan, Selo, Kemiskinan Struktural dan Pembangunan Kata Pengantar dalam Alfian (at.AI), Kemiskinan Struktural, Suatu Bunga Rampai, Jakarta, YIIS, 1980.

Suwondo, Kutu, Struktur Sosial dan Kemiskinan, Slatiga, Yayasan Bina Dharma, 1998.

Sutrisno Hadi, Methodologi Research Jilid 1, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1984.

Yeremias, T Keban Enam Dimensi Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu, Gava Media, Yogyakarta, 2004.